

PENGADILAN AGAMA KUDUS

LAPORAN KEUANGAN DIPA 01

Semester I Tahun 2023

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2023

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam

Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385

e-mail : infopakudus@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Kudus adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kudus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kudus, 03 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
PENGADILAN AGAMA KUDUS



M. Asfaroni, S.H.I

NIP. 197806182003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	15
B.3 Belanja Barang	16
B.4 Belanja Modal	16
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	18

B.4.4 Belanja Modal Lainnya.....	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran.....	19
C.2 Persediaan	19
C.3 Tanah	20
C.4 Peralatan dan Mesin	22
C.5 Gedung dan Bangunan	22
C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	23
C.7 Aset Tetap Lainnya	23
C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan	23
C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24
C.10 Aset Tak Berwujud	24
C.11 Aset Lain–Lain.....	25
C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	26
C.13 Utang kepada Pihak Ketiga	26
C.14 Uang Muka dari KPPN	27
C.15 Ekuitas	27
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	28
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	28
D.2 Beban Pegawai	28
D.3 Beban Persediaan	29
D.4 Beban Barang dan Jasa.....	29
D.5. Beban Pemeliharaan	30
D.6 Beban Perjalanan Dinas.....	31
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	31
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	32
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional.....	32

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	33
E.1 Ekuitas Awal	33
E.2 Defisit LO	33
E.3 Koreksi Nilai Persediaan.....	33
E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	33
E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	33
E.6 Koreksi Lain-lain.....	33
E.7 Transaksi Antar Entitas	34
E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	34
E.7.2 Transfer keluar.....	34
E.8 Ekuitas Akhir.....	34
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	35
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	35
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	35

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan</i>	12
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB TA 2022 dan TA 2021</i>	13
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2022</i>	14
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021</i>	15
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan TA 2021</i>	15
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan TA 2021</i>	16
<i>Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021</i>	17
<i>Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan TA 2021</i>	17
<i>Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan TA 2021</i>	18
<i>Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2022 dan TA 2021</i>	18
<i>Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021</i>	18
<i>Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021</i>	19
<i>Tabel 13. Rincian Persediaan</i>	20
<i>Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2022</i>	21
<i>Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</i>	24
<i>Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya</i>	26
<i>Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021</i>	28
<i>Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021</i>	29
<i>Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021</i>	29
<i>Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021</i>	30
<i>Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021</i>	30
<i>Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021</i>	31
<i>Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan & Amortisasi 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 ..</i>	31
<i>Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021</i>	32
<i>Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021</i>	32

Pengadilan Agama Kudus

Jl. Raya Kudus – Pati Km. 04 Dersalam Kudus – Jawa Tengah 59321

Telp. 0291-438385 Fax. 0291-438385 e-mail : infopakudus@yahoo.com

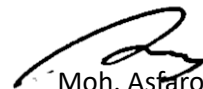
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2022 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kudus, 03 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Moh. Asfaroni, S.H.I
NIP. 197806182003121002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.200.000,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0,00 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2023 adalah sebesar Rp.2.541.003.485,00 atau mencapai 51,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.894.357.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.17.901.604.943,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.20.498.700,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.18.361.285.538,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.480.179.295,00 dan Rp.17.901.604.943,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.1.400.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.2.812.166.444,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(2.810.766.444,00). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. (2.810.766.444,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.18.172.567.902,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp.(2.810.766.444,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.2.539.803.485,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp.17.901.604.943,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2023			30 JUNI 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.021,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.021,00	0,00
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2.	3.496.207.000,00	1.532.673.645,00	43,84	2.779.532.000,00	1.948.887.422,00	70,12
2. Belanja Barang	B.3.	1.036.918.000,00	676.829.840,00	65,27	926.633.000,00	556.369.242,00	60,04
3. Belanja Modal	B.4.	361.232.000,00	331.500.000,00	91,77	37.500.000,00	37.497.900,00	99,99
Jumlah Belanja		4.894.357.000,00	2.541.003.485,00	51,92	3.743.665.000,00	2.542.754.564,00	67,92

NERACA

PENGADILAN AGAMA KUDUS
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2022	31 DESEMBER 2021
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	18.000.000	-
Persediaan	C. 2	2.498.700	1.374.900
Jumlah Aset Lancar		20.498.700	1.374.900
Aset Tetap			
Tanah	C. 3	13.325.572.000	13.325.572.000
Peralatan dan Mesin	C. 4	2.285.798.185	1.954.688.185
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.908.886.168)	(1.819.276.347)
Peralatan dan Mesin (Netto)		376.912.017	135.021.838
Gedung dan Bangunan	C. 5	5.215.965.000	5.215.965.000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(563.691.366)	(501.058.992)
Gedung dan Bangunan (Netto)		4.652.273.634	4.714.906.008
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 6	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 7	6.527.887	6.527.887
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 8	-	-
Jumlah Aset Tetap		18.361.285.538	18.182.027.733
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 10	4.900.000	4.900.000
Aset Lain-lain	C. 11	5.828.800	5.828.800
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 12	(10.728.800)	(10.728.800)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		18.381.784.238	18.183.402.633
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 13	451.668.156	10.634.731
Utang Yng Belum Ditagihkan	C. 14	10.511.139	0
Pendapatan Diterima di Muka	C. 15	0	200.000
Uang Muka dari KPPN	C. 16	18.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		480.179.295	10.834.731
JUMLAH KEWAJIBAN		480.179.295	10.834.731
EKUITAS			
Ekuitas	C. 15	17.901.604.943	18.172.567.902
JUMLAH EKUITAS		17.901.604.943	18.172.567.902
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		18.381.784.238	18.183.402.633

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA KUDUS LAPORAN OPERASIONAL 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		0	0
PENDAPANA NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		1.400.000	0
PENDAPATAN HIBAH		0	0
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	1.400.000	0
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	1.965.666.801	1.944.671.286
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	5.716.200	5.716.200
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	443.423.860	443.423.860
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	224.259.788	224.259.788
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	20.857.600	20.857.600
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	152.242.195	152.242.195
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	D. 8	0	0
JUMLAH BEBAN		2.812.166.444	2.631.032.980
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.810.766.444)	(2.629.832.980)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	21
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	21
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	(2.810.766.444)	(2.810.766.444)
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS (DEFISIT) LO		(2.810.766.444)	(2.810.766.444)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	18.172.564.902	18.172.567.902
SURPLUS/DEFISIT LO	E. 2	(2.810.766.444)	(2.810.766.444)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 5	-	-
Koreksi Lain-lain	E. 6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 7	2.539.803.485	2.539.803.485
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(270.962.959)	(88.278.416)
EKUITAS AKHIR	E. 8	17.901.604.943	17.901.604.943

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar

Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama Kudus*

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2022-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2021 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2022-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Kudus sebagai Visi dan Misinya

Visi Pengadilan Agama Kudus : Terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, Mandiri Dan Berkeadilan Yang Berbasis Pelayanan Publik.

Misi Pengadilan Agama Kudus :

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Kudus yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Meningkatkan SDM Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien, dan professional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan

Langkah Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kudus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis AkruaI

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Kudus menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Kudus dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Urusan Administrasi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.361.232.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

Akuntansi atas

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Kudus telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) POK dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Semester I Tahun 2023	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	3.496.207.000	3.496.207.000
Belanja Barang	1.036.918.000	1.036.918.000
Belanja Modal	361.232.000	361.232.000
Jumlah Belanja	4.894.357.000	4.894.357.000

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp.1.200.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.1.200.000,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	30 Juni Tahun 2023		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bngunan	0	1.200.000	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		0	1.200.000	0,00
Pengembalian		0	0	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		0	1.200.000	0,00

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2023 mengalami penurunan Rp.21,- dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 hanya terdapat pendapatan Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan sebesar Rp.1.200.000,00 berupa sewa kantin dengan nomor persetujuan dari KPKNL Nomor S.34/MK.6/WKN.09/KNL.01/2022 Tanggal 10 Februari 2022, dan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 201/SEK/SK/III/2022 Tanggal 3 Maret 2022 Tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Pengadilan Agama Kudus, serta Perjanjian sewa BMN antara Pengadilan Agama Kudus Kelas IB dengan Penyewa Kantin dengan nomor W11-A16/756/PL.02/III/2022 tanggal 09 Maret 2022.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2023 dan TA 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	TA. 2023	TA.2022	Kenaikan(Penurunan)	
				Rp	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21	(21,00)	(100,00)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bngunan	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		1.200.000	1.200.000	0,00	(100,00)

Belanja

Realisasi Belanja
Negara Rp.
2.541.003.485,00.

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Kudus pada periode 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.2.541.003.485,00 atau 51,92% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.496.207.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2023

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	3.496.207.000	1.532.673.645	43,84
52	Belanja Barang	1.036.918.000	676.829.840	65,27
53	Belanja Modal	361.232.000	331.500.000	91,77
Jumlah Belanja Bruto		4.894.357.000	2.541.003.485	51,92
Pengembalian Belanja		0	0	
Jumlah Belanja Netto		4.894.357.000	2.541.003.485	51,92

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.1.751.079,00 atau sebesar 0,07% dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu pada periode yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi pegawai Pengadilan Agama Kudus. Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
		30 Juni 2023	30 Juni 2022	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	1.532.673.645	1.948.887.422	(416.213.777)	(27,16)
52	Belanja Barang	676.829.840	556.369.242	120.460.598	17,80
53	Belanja Modal	331.500.000	37.497.900	294.002.100	88,69
Jumlah Belanja Netto		2.541.003.485	2.542.754.564	(1.751.079)	(0,07)

B.2 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp.1.532.673.645,
00

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.532.673.645,00 dan Rp.1.544.662.574,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp.404.224.848,00 atau 20,74% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2021. Hal ini disebabkan adanya mutasi masuk pegawai.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	658.965.320	757.254.720	(98.289.400)	(14,92)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.905	10.899	(994)	(10,04)
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	49.876.094	53.084.740	(3.208.646)	(6,43)
Belanja Tunj.Anak PNS	13.600.090	13.909.574	(309.484)	(2,28)
Belanja Tunj.Struktural PNS	18.200.000	18.200.000	0	0,00
Belanja Tunj.Fungsional PNS	587.405.000	855.940.000	(268.535.000)	(45,72)
Belanja Tunj.PPh PNS	68.966.392	112.883.729	(43.917.337)	(63,68)
Belanja Tunj.Beras PNS	37.079.040	38.237.760	(1.158.720)	(3,13)
Belanja Uang Makan PNS	89.452.000	92.311.000	(2.859.000)	(3,20)
Belanja Tunj.Umum PNS	9.490.000	6.955.000	2.535.000	26,71
Realisasi Belanja Bruto	1.533.043.841	1.948.887.422	(415.743.581)	(27,12)
Pengembalian	(370.000)	0	(370.000)	(100,00)
Realisasi Belanja Netto	1.532.673.645	1.948.887.422	(415.743.581)	(27,12)

B.3 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.676.829.840,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.676.829.840,00 dan Rp.556.369.242,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp.120.460.598,00 atau 17,80% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan karena pada pertengahan semester I tahun 2022 terdapat tambahan anggaran dari pusat berupa pagu tambahan langganan internet (BA BUN) yang belum dapat terealisasi karena diperlukan adanya koordinasi dengan pejabat pengadaan dan pihak terkait dalam proses pelaksanaannya sampai dengan akhir periode semester I tahun 2021.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	359.420.198	322.172.098	37.248.100	10,36
Belanja Barang Non Operasional	0	600.000	(600.000)	0,00
Belanja Barang persediaan	7.286.000	6.652.000	634.000	8,70
Belanja Jasa	71.523.143	59.012.957	12.510.186	17,49
Belanja Pemeliharaan	217.742.899	224.259.788	76.290.712	35,04
Belanja Perjalanan Dinas	20.857.600	20.857.600	(5.622.400)	(26,96)
Realisasi Belanja Bruto	676.829.840	556.369.242	120.460.598	17,80
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	676.829.840	556.369.242	120.460.598	17,80

B.4 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp.331.500.000,00

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.331.500.000,00 dan Rp. 37.497.900,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp.12.497.900,00 atau 33,33% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 anggaran belanja modal meningkat di banding tahun 2022.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.500.000	37.497.900	294.002.100	88,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	331.500.000	37.497.900	294.002.100	88,69
Pengembalian	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	331.500.000	37.497.900	294.002.100	88,69

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.331.500.000,00 dan Rp.37.497.900,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2022.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.500.000	37.497.900	294.002.100	88,69
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengadaan	0	0	0	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	331.500.000	37.497.900	294.002.100	88,69
Pengembalian	0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto	331.500.000	37.497.900	294.002.100	88,69

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2022	TA 2021	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	-
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0	-
Pengembalian	0	0	0	-
Realisasi Belanja Netto	0	0	0	-



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.18.000.000,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.18.000.000,00 dan Rp.0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.18.000.000,00 atau 100,00%. Hal ini dikarenakan Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya melalui mekanisme SP2D Nihil dengan nomor 211291701000385 tanggal 30 Desember 2020 dan SSBP pengembalian sisa UP dengan Nomor NTPN B79970N9V97G8BR4 tanggal 31 Desember 2021. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember TA 2021
1.	Uang Persediaan per 30 Juni 2023	18.000.000,00	0,00
	Jumlah	18.000.000,00	0,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kuitansi yang belum di GU kan	11.119.200
2	Uang Tunai di Brankas	6.880.800
3	Uang di Rekening Bank	-
	Total	18.000.000
	Pajak	-
	<u>Kas di Bendahara Pengeluaran</u>	18.000.000

C.2 Persediaan

*Persediaan
Rp.2.498.700,00*

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.2.498.700,00 dan Rp.1.374.900,00, terjadi kenaikan sebesar Rp.1.123.800,00 atau 82 %.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	Mutasi	30 Juni 2023
1	Barang Konsumsi	1.374.900	1.123.800	2.498.700
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah		1.374.900	1.123.800	2.498.700

Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik Persediaan sesuai Berita Acara opname Fisik No. W11-A16/ 1163 /KU.00/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023

C.3 Tanah

Tanah
Rp13.325.572.000,
00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Badan Urusan Administrasi per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.13.325.572.000,00 dan Rp.13.325.572.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	13.325.572.000
Mutasi Tambah :	-
Mutasi Kurang :	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2023	13.325.572.000

Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2023

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Nomor 005, Tanggal 21 Juli 2009	Jl. Raya Kudus-Pati Km.04 Dersalam Kudus 59321	Pemerintah Republik Indonesia cq. Mahkamah Agung RI	3.172	Rp 4.071.450.000

C.4 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp.2.285.798.1
85,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.2.285.798.185,00 dan Rp.1.954.688.185,00, terjadi kenaikan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp.331.500.000, karena pada periode semester I tahun 2023 terdapat realisasi penambahan aset peralatan dan mesin berupa pembelian 2 unit PC kepaniteraan. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	1.954.688.185
Pembelian	331.500.000
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Transfer Masuk	-
Jumlah Mutasi Tambah	331.500.000
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	331.500.000
Saldo Per 30 Juni 2023	2.285.798.185
Akumulasi Penyusutan	1.908.886.168
Nilai Buku	376.912.017

C.5 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp.5.215.965.0
00,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.5.215.965.000,00 dan Rp.5.215.965.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	5.215.965.000
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2023	5.215.965.000
Akumulasi Penyusutan	563.691.366
Nilai Buku	4.652.273.634

C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp.0,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	0
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2022	0
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp.6.527.887,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.6.527.887,00 dan Rp.6.527.887,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	6.527.887
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2023	6.527.887
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp.0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	0
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	0

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(2.472.577.534,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(2.472.577.534,00) dan Rp.(2.320.335.339,00), terjadi kenaikan sebesar (Rp.152.242.195,00) atau 6,16%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.285.798.185	(1.908.886.168)	376.912.017
2	Gedung dan Bangunan	5.215.965.000	(563.691.366)	4.652.273.634
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	6.527.887	-	6.527.887
Jumlah		7.508.291.072	(2.472.557.534)	5.035.713.538

C.10 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp.4.900.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.4.900.000,00 dan Rp.4.900.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Badan Urusan Administrasi berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	4.900.000
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2023	4.900.000
Akumulasi Penyusutan	4.287.500
Nilai Buku	0

C.11 Aset Lain–Lain

Aset Lain-Lain
Rp.5.828.800,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.5.828.800,00 dan Rp.5.828.800,00, tidak terjadi penurunan maupun kenaikan nilai aset lain-lain per 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Kudus serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2022	5.828.800
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo Per 30 Juni 2023	5.828.800
Akumulasi Penyusutan	5.828.800
Nilai Buku	0

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.(10.728.800,00) dan Rp.(10.728.800,00), terjadi kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0%.

Rp.(10.728.800,00) Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Juni 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	4.900.000	(4.900.000)	0
2	Aset Lain-lain	5.828.800	(5.828.800)	0
Jumlah		10.728.800	(10.728.800)	0

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.451.668.156,00 dan Rp.10.634.731,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang masih harus di bayar	432.993.156	Gaji Pegawai bulan Juli dan Gaji ke 13
2	Belanja Barang yang masih harus di bayar	18.675.000	Honor PPNPN bulan Juni yang di bayarkan tanggal 1 Juli 2023
Jumlah		451.668.156	

C.14 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.10.511.139,00 dan Rp.0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Kuitansi yang belum di SP2D kan	10.511.139	Akan di lakukan revolving GUP pada awal bulan Juli 2023
Jumlah		10.511.139	

Uang muka dari KPPN Rp.18.000.000,00

C.15 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.18.000.000,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN pada tahun 2023 dibagi atas dua macam, yaitu Uang Persediaan (UP) berupa uang tunai pada kas bendahara pengeluaran dan Uang Persediaan (UP) berupa Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Ekuitas Rp.17.901.604.943,00

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.17.901.604.943,00 dan Rp.18.172.567.902,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNPB
Rp.1.400.000,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.1.400.000,00 dan Rp.0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 17. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB Lainnya				
Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	1.400.000	0	100
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		1.400.000	0	100
Pendapatan Lain-lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan	0	0	0
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah Pendapatan Lain-lain		0	0	0
Total		1.400.000	0	100

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.1.965.666.801,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.965.666.801,00 dan Rp.1.944.671.286,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 18. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Belanja Gaji Pokok PNS	756.670.320	672.218.040	12,56
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.899	8.862	22,98
3	Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	53.026.300	46.532.020	13,95
4	Belanj Tunj.Anak PNS	13.886.198	12.645.354	9,81
5	Belanja Tunj.Struktural PNS	18.300.000	18.200.000	0,54
6	Belanja Tunj.Fungsional PNS	852.940.0000	597.965.000	42,64
7	Belanj Tunj.PPh PNS	112.333.760	72.347.398	55,27
8	Belanja Tunj.Beras PNS	38.237.760	28.605.900	33,67
9	Belanja Uang Makan PNS	92.311.000	92.290.000	0,02
10	Belanja Tunj.Umum PNS	6.955.000	3.850.000	80,64
Total		1.944.671.286	1.544.662.574	25,89

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp.5.716.200,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.5.716.200,00 dan Rp.6.766.300,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	5.716.200	6.766.300	(18,37)
2	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		5.716.200	6.766.300	(18,37)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp.443.423.860,00

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.443.423.860,00 dan Rp.375.044.941,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	324.602.500	266.443.400	17,92
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19.500	357.300	(1732,31)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	15.300.000	14.950.000	2,29
4	Beban Barang Operasional Lainnya	40.721.782	39.487.598	3,03
5	Beban Bahan	0	600.000	0
6	Beban Langganan Listrik	41.624.685	35.788.097	14,02
7	Beban Langganan Telepon	691.393	636.746	7,90
8	Beban Sewa	19.500.000	16.200.000	16,92
9	Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	964.000	0	100,00
Total		443.423.860	375.044.941	15,55

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban

Pemeliharaan

Rp.224.259.788,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.224.259.788,00 dan Rp.141.452.187,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Terdapat kesalahan penginputan akun persediaan suku cadang yang seharusnya akun barang konsumsi, belum dilaksanakan reklas sebesar Rp.480.000,-.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	171.938.000	106.203.500	38,23
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.841.788	35.248.687	32,01
3	Beban Persediaan suku cadang	480.000	0	100,00
Total		224.259.788	141.452.187	36,92

Beban Perjalanan
Dinas
Rp.20.857.600,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.20.857.600,00 dan Rp.26.480.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	20.527.600	25.820.000	39.52
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000	660.000	100.00
Total		20.857.600	26.480.000	26.480.000

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.152.242.195,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.152.242.195,00 dan Rp.136.618.266,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89.609.821	73.985.892	17,44
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62.632.374	62.632.374	0,00
Jumlah Penyusutan		152.242.195	136.618.266	10,26
3	Beban Amortisasi Software	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi		0	0	0,00
Total		152.242.195	136.618.266	10,26

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Tabel 24. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNB	0	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0	0
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian lancar Tagihan TP/TGR	0	0	0
4	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total		0	0	0

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.0,00

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	21	(100,00)
2	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Total		0	21	21



0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp.18.172.567.902,00
Rp.18.172.567.902,00 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.18.172.567.902,00 dan Rp. 2.810.766.444,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO Rp.(2.810.766.444,00)
Rp.(2.810.766.444,00) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah defisit sebesar Rp.(2.810.766.444,00) dan Rp.(2.629.832.959,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0,00
Rp.0,00 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

E.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0,00
Rp.0,00 Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0,00
Rp.0,00 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

E.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain Rp.0,00
Rp.0,00 Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah dibuat per 31 Desember 2022, berupa Temuan BPK RI Tahun 2022 yang belum selesai di Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Temuan BPK RI Tahun 2021	0
Total		0

E.7 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp.2.539.803.485,00

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.539.803.485,00 dan Rp.2.541.554.543,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.541.003.485
Diterima dari Entitas Lain	(1.200.000)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
	2.539.803.485

E.7.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp.(1.200.000,00) sedangkan DKEL sebesar Rp.2.541.003.485,00.

E.7.2 Transfer keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp.0,00.

E.8 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp.17.901.604.943,00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.17.901.604.943,00 dan Rp. 18.321.162.787,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 30 Juni 2023 pada Pengadilan Agama Kudus yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2023.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat hasil audit BPK yang harus ditindak lanjuti Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni tahun 2023.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kudus

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Kudus adalah:

Rekening Bendahara pengeluaran pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Kudus A/C 653244009731000 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400973 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0.

Surat ijin penerbitan persetujuan kembali rekening virtual oleh Kepala KPPN Kudus Nomor 000029 tanggal 30 April 2021, setelah rekening giro yang sebelumnya di tutup sesuai dengan tahapan restrukturisasi rekening Pemerintah mengikuti PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga serta surat dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor S-762/PB.3/2022 tanggal 21 April 2021 tentang Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Lingkup Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

2. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2023 bernomor : DIPA-005.01-2.400973/2022 tanggal 23 November 2022 berjumlah sebesar Rp.4.894.357.000,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	522192	5.000.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	252.375.000,00
	521119	26.913.000,00
	521811	21.000.000,00
	521111	174.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522111	100.800.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	1.200.000,00
	522141	3.600.000,00
	523111	197.220.000,00
	523121	96.270.000,00
	521115	41.400.000,00
	521111	18.750.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	7.680.000,00
	524113	1.760.000,00
	521131	2.500.000,00
	522192	5.000.000,00
	521141	21.600.000,00
005.01.02		
1071.EAD	532111	310.732.000,00
	532111	50.500.000,00
Total		<u>4.894.357.000,00</u>

b. Revisi DIPA 1 (Tanggal 19 April 2023)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu anggaran pada Revisi DIPA 1, karena merupakan pengesahan revisi POK dan revisi halaman III DIPA.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.01.02		
1066.EBA	522192	5.000.000,00
005.01.WA		
1066.EAA	511111	1.369.833.000,00
	511119	23.000,00
	511121	136.985.000,00
	511122	27.395.000,00
	511123	36.400.000,00
	511124	1.373.110.000,00
	511125	274.535.000,00
	511126	63.411.000,00
	511129	202.620.000,00
	511151	11.895.000,00
	521111	252.375.000,00
	521119	41.901.000,00
	521811	17.000.000,00
	521111	171.000.000,00
	521114	2.400.000,00
	522111	100.800.000,00
	522112	6.000.000,00
	522113	12.000,00
	522141	3.300.000,00
	523111	197.220.000,00
	523121	96.270.000,00
	521115	34.900.000,00
	521111	18.750.000,00
	521119	3.150.000,00
	521119	2.500.000,00
	524111	45.800.000,00
	524111	7.680.000,00
	524113	1.760.000,00
	521131	2.500.000,00
	522192	5.000.000,00
	521141	21.600.000,00
005.01.02		
1071.EAD	532111	310.732.000,00

	532111	50.500.000,00
	Total	<u>4.894.357.000,00</u>

3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAIBA 2022.
 - a. Jurnal Penyesuaian
 - Pada tanggal 02 Januari 2023 merupakan jurnal balik dari penyajian jurnal akrual Tahun Anggaran Yang Lalu.

4. Perbaikan Transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP

Tidak Terdapat perbaikan transaksi SPM/SP2D/SSPB/SSBP pada semester I tahun 2023.

5. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Petikan Keputusan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Nomor W11-A16/24/KU.01/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan Saiba dan Staf Pengelola Keuangan Simak-BMN, dan telah dirubah karena adanya mutasi Pejabat Pengelola DIPA dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kudus Nomor W11-A16/675/KU.01/III/2023 tanggal 01 Maret 2023. Maka Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan Saiba/PPABP dan Staf Pengelola Keuangan Simak-BMN Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Penandatanganan SPM	:	Umardhani,SHI.
Bendahara Pengeluaran	:	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
Staf Keuangan-Operator SAIBA / PPABP	:	Agus Fatchurrochim Thoyib.
Staf Keuangan-Operator SAIBA /SIMAK-BMN	:	Indah Fatmawati, SE.



LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN SEMESTER I TA. 2023

KODE	URAIAN	MM	KUAN TITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN PER 30 JUNI 2023	NILAI BUKU PER 30 JUNI 2023
1	2	3	4	5	9	10
131111	Tanah		3.172	13.325.572.000	0	13.325.572.000
2.01.01	TANAH PERSIL	1	3.172	13.325.572.000	0	13.325.572.000
132111	PERALATAN DAN MESIN		679	2.294.478.985	1.917.566.968	376.912.017
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	7	511.958.328	251.029.757	260.928.571
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	7	1	140.000	140.000	0
3.03.03	ALAT UKUR	5	3	9.500.000	9.500.000	0
3.05.01	ALAT KANTOR	5	120	259.230.400	259.230.400	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	437	642.742.436	642.742.436	0
3.06.01	ALAT STUDIO	5	7	22.604.000	18.549.600	4.054.400
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	9	6.928.300	6.928.300	0
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	1	99.500.000	99.500.000	0
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	1	10.843.050	5.060.090	5.782.960
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	65	605.792.973	508.396.887	97.396.086
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	28	125.194.498	116.444.498	8.750.000
135121	ASET TETAP LAINNYA		64	6.527.887	0	6.527.887
4.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	64	64	6.527.887	0	6.527.887
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		4	5.215.965.000	563.691.366	4.652.273.634
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50	3	4.973.086.000	537.974.766	4.435.111.234
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50	1	242.879.000	25.716.600	217.162.400
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		53	6.724.300	6.724.300	0

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS SEMESTER I TAHUN 2023

3.02.01	ALAT NAGKUTAN DARAT BERMOTOR	1	1	300.000	300.000	0
3.05.01	ALAT KANTOR	5	17	2.392.800	2.392.800	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	35	3.619.600	3.619.600	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	4	1	411.900	411.900	0
TOTAL				20.854.168.172	2.492.882.634	18.361.285.538

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
SEMESTER I TA. 2023

No	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	No. KDP	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai KDP	% Penyelesaian	Sumber Dana (Rp) Murni/Pinjaman	Uang Muka	Retensi	Keterangan		
														Dilanjutkan	Dihentikan Sementara	Dihentikan Permanen
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL	-	-	-	-	-	-	
2.																

LAMPIRAN A.2**HIBAH**

BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA JASA
PER 31 DESEMBER 2017

No	Nama Pemberi	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	Judicial Sector Support Program (JSSP) - Belanda	Jasa	LN	Rp 253.096.409	Rp 253.096.409	-	-
2	UE-UNDP	Jasa	LN	Rp 17.024.831.231	Rp 17.024.831.231	-	-

PENGADILAN AGAMA KUDUS

LAPORAN KEUANGAN DIPA 04

Semester I

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2023

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Kudus - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

e-mail : paKudus01@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KUDUS

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Raya Kudus - Pati KM 04 Kab. Kudus

Telp./Fax. 0291-438 385

Kudus - Jawa Tengah 59321

e-mail : keuanganpakudus@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

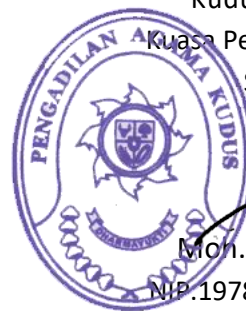
Pengadilan Agama Kudus adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Kudus. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kudus, 03 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Moh. Asfaroni, SHI

NIP.197806182003121002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	38
C.1. Aset Lancar.....	38
C.2. Aset Tetap	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	41
C.6. Ekuitas.....	42
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	43
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	43
D.2. Beban Pegawai.....	43

D.3.	Beban Persediaan.....	43
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	44
D.5.	Beban Pemeliharaan	44
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	45
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	45
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	45
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	45
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	45
D.11.	Beban Lain-lain.....	46
D.12.	Kegiatan Non Operasional.....	46
D.13.	Pos Luar Biasa.....	46
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	47
E.1.	Ekuitas Awal	47
E.2.	Surplus (defisit) LO	47
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	47
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	47
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	47
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	48
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	48
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	48
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	49
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	49
E.3.	Ekuitas Akhir	49
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	50
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	50
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	50
	Laporan-laporan Pendukung.....	53
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	54

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023.....	35
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 dan 2022	36
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023	36
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023.....	37
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022	37
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022.....	38
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022.....	39
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni 2022	39
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023.....	55
Tabel 38 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	56

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Kudus

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Kudus - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014 e-mail : paKudus01@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kudus, 03 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



Moh. Asfaroni, SHI

NIP.197806182003121002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kudus Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 30 Juni 2023 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp95.139.000,- atau mencapai 61,22 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp155.405.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp35.512.500,- atau mencapai 45,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp79.150.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2023 dan 2022 .

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.545.500,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp2.545.500,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp2.234.500,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp2.234.500,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp311.000,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp311.000 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp95.139.000,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar 38.314.300,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp56.824.700,- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp56.824.700,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp56.824.700,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.112.800,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp56.824.700,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(59.626.500) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp311.000,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	155.405.000	95.139.000	61,22,00	74.338.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		155.405.000	95.139.000	61,22,00	74.338.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	79.150.000	35.512.500	44,87	26.950.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		79.150.000	35.512.500	44,87	26.950.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA KUDUS

NERACA

PER 30 Juni 2023 DAN 2022

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank		0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	600.000	1.400.000
Persediaan	C.1. 2.	1.945.500	558.415
Jumlah Aset Lancar		2.545.500	1.958.415
Aset Tetap	C.2	0	0
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		2.545.500	1.958.415
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.5. 1.	1.500.000	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	2.	134.500	0
Uang Muka dari KPPN	3.	600.000	1.400.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.234.500	1.400.000
Jumlah Kewajiban		2.234.500	1.400.000
EKUITAS			

Ekuitas Dana Lancar	C.6	0	0
Jumlah Ekuitas Dana		311.000	558.415
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		2.545.500	1.958.415

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	95.139.000	74.338.000
Jumlah Pendapatan		95.139.000	74.338.000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	1.794.300	1.898.611
Beban Barang dan Jasa	D. 4	13.500.000	26.950.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	23.020.000	0
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		38.314.300	28.848.611
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		56.824.700	45.489.389
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	56.824.700	45.489.389
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	56.824.700	45.489.389

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA KUDUS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Ekuitas Awal	E. 1	3.112.800	2.457.026
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	56.824.700	45.489.389
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(59.626.500)	(47.388.000)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(2.801.800)	(1.898.611)
Ekuitas Akhir		311.000	558.415

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

- I. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagian Akun Standar;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kudus Tahun 2015-2023 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Kudus Tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2023.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

Visi Pengadilan Agama Kudus adalah terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Misi Pengadilan Agama Kudus adalah:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Kudus melakukan beberapa langkah-langkah strategis yaitu melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kudus. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Kudus menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi

tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Badan Urusan Administrasi telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2023	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan	155.405.000	155.405.000
Jumlah Pendapatan	155.405.000	155.405.000
Belanja		
Belanja Barang	79.150.000	79.150.000
Jumlah Belanja	79.150.000	79.150.000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp95.139.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.95.139.000,- atau mencapai 61,22,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.155.405.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Kudus adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	52.935.000	31.175.000	58,89
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	102.470.000	53.794.000	52,50
3.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	10.170.000	0
Total Pendapatan		155.405.000	95.139.000	61,22

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.801.000,- atau 21,86 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan PNBP dari relaas Panggilan, Pemberitahuan serta meningkatnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kudus.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	10.170.000	0	10.170.000	100,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	31.175.000	25.700.000	5.475.000	17,56
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	53.794.000	48.638.000	5.156.000	9,58
Total Pendapatan		95.139.000	74.338.000	20.801.000	21,86

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
35.512.500*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp.35.512.500 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 44,87% dari anggaran senilai Rp.79.150.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

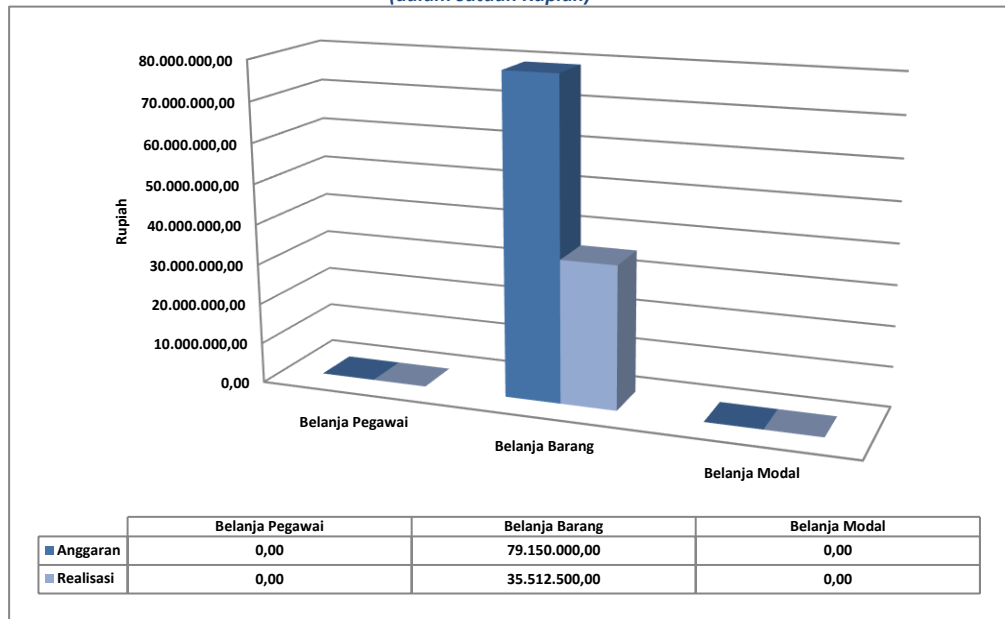
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	79.150.000	35.512.500	44,87
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	79.150.000	35.512.500	44,87

Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	79.150.000	35.512.500	44,87

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2022 & 2021

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp.8.562.500,- atau sebesar 24,11 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

Adanya tambahan anggaran yang tahun lalu sebesar Rp.20.400.000,- menjadi sebesar Rp.79.150.000,- yaitu anggaran untuk Jasa konsultasi Pos Bantuan Hukum.

Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
				Rp	%
51	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
52	Belanja Barang	35.512.500	26.950.000	8.562.500	24,11
53	Belanja Modal	0	0	0	0,00

Total Belanja	35.512.500	26.950.000	8.562.500	24,11
---------------	------------	------------	-----------	-------

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp35.512.500*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.35.512.500,- dan Rp.26.950.000,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 24,11 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain Adanya tambahan anggaran yang tahun lalu sebesar Rp.20.400.000,- menjadi sebesar Rp.79.150.000,- yaitu anggaran untuk Jasa konsultasi Pos Bantuan Hukum.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
		Realisasi	Realisasi	Rp	%
52	Belanja Barang Non Operasional	0	7.350.000	(7.350.000)	(100,00)
52	Belanja Barang Persediaan	572.500	0	572.500	100,00
52	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.940.000	0	22.940.000	100,00
52	Belanja Jasa	12.000.000	19.600.000	(7.600.000)	(63,33)
	Total Belanja Brutto	35.512.500	26.950.000	8.562.500	24,11
	Pengembalian Belanja	0	0	0	0
	Total Belanja Netto	35.512.500	26.950.000	8.562.500	24,11

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:
Rp 2.545.500*

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.545.500,- dan Rp.1.958.415,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Kudus per 30 Juni 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 7 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	600.000	1.400.000
Persediaan	1.945.500	558.415
Total Aset Lancar	2.545.500	1.958.415

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 600.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.600.000,- dan Rp.1.400.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp1.945.500*

Persediaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.1.945.500,- dan Rp. 558.415,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni 2022

No.	Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022
1	Barang Konsumsi	1.945.500	558.415
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0

4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		1.945.500	558.415

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi
dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[Ira.ner13Sst]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp 600.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 600.000,- dan Rp. 1.400.000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga I

*Utang Kepada
Pihak Ketiga I
Rp.1.500.000*

Utang kepada Pihak Ketiga I merupakan piutang dari KPPN melalui uang persediaan yang di terima oleh Pengadilan Agama Kudus pada awal tahun sejumlah Rp.1.500.000,-

C.5.3. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang yang
belum di
tagihkan
Rp.134.500*

Utang yang belum di tagihkan adalah sisa dari kuitansi atau nota yang belum di SP2D kan sejumlah Rp.134.500,-

C.6. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp 311.000*

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp311.000,- dan Rp3.112.800,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp :
Rp95.139.000,-*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp95.139.000,- dan Rp74.338.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	10.170.000	0,00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	52.935.000	31.175.000	58,89
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	102.470.000	53.794.000	52,50
Total Pendapatan		155.405.000	95.139.000	61,22 0,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp1.794.300,00*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.794.300,- dan Rp1.898.611,-. Beban Persediaan merupakan

beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.794.300	1.898.611	(104.311)	(5,81)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	1.794.300	1.898.611	(104.311)	(5,81)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
Jasa :
Rp13.500.000,-*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.500.000,- dan Rp26.950.000,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	12.000.000	19.600.000	(7.600.000)	(63,33)
Beban Honor Output Kegiatan	0	350.000	(350.000)	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.500.000	7.000.000	(5.500.000)	(366,67)
Total Beban Barang dan Jasa	13.500.000	26.950.000	(13.450.000)	(99,63)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp23.020.000,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.020.000,- dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
: Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.112.800,- dan Rp2.457.026,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp56.824.700,- dan Rp45.489.389,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. Dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp59.626.500,-) dan (Rp47.388.000,-)

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2022**

(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(95.139.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	35.512.500
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(59.626.500)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar (Rp95.139.000,-) sedangkan DKEL sebesar Rp35.512.500,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2023 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 , adalah Rp0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp311.000,- dan Rp1.632.000,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan Semester I dan Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan disajikan pada laporan keuangan Semester I.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Kudus adalah:

1. Rekening Bendahara pengeluaran pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Kudus A/C 653194009741000 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA KUDUS 400974 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0,-. Surat ijin penerbitan persetujuan kembali rekening virtual oleh

Kepala KPPN Kudus Nomor 000032 tanggal 30 April 2022, setelah rekening giro yang sebelumnya di tutup sesuai dengan tahapan restrukturisasi rekening Pemerintah mengikuti PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementrian Negara/Lembaga serta surat dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara Nomor S-665/PB.3/2022 tanggal 05 April 2022 tentang Pemindahbukuan dan Penutupan Rekening Lingkup Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

2. BANK BRI A/C 0038-01-001839-30-2 a.n. RPL 129 PDT PA KUDUS UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara Pengadilan Agama Kudus dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 144.573.010.-.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut

:

1. Biaya Perkara yaitu sebesar Rp. 122.560.000,-
2. Biaya Konsinyasi yaitu sebesar Rp.0,-
3. Biaya Eksekusi yaitu sebesar Rp.451.000,-

F.2.5. Revisi DIPA

Terdapat revisi DIPA Nomor: SP DIPA-005.04.2.400943/2022 tanggal 23 November 2022 pada Semester I tahun 2023 pada halaman III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan DIPA dengan anggaran yang masih sama berjumlah sebesar Rp.79.150.000,-

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat perbaikan transaksi SPM,SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) DAN sspb.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Petikan Keputusan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Barang Nomor W11-A16/24/KU.01/I/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan Saiba dan Staf Pengelola Keuangan Simak-BMN, dan telah dirubah karena adanya mutasi Pejabat Pengelola DIPA dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kudus Nomor W11-A16/675KU.01/III/2023 tanggal 01 Maret 2023. Maka Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Staf Pengelola Keuangan Saiba/PPABP dan Staf Pengelola Keuangan Simak-BMN Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Moh. Asfaroni, SHI.
Pejabat Penandatanganan SPM	:	Umardhani,SHI.
Bendahara Pengeluaran	:	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.
Staf Keuangan-Operator SAIBA / PPABP	:	Agus Fatchurrochim Thoyib.
Staf Keuangan-Operator SAIBA /SIMAK-BMN	:	Indah Fatmawati, SE..

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Kudus

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2023	2023	Per 30 Juni 2023	Per 30 Juni 2023
A.	Peralatan dan Mesin						
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Agama Kudus
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
	NIHIL						
			Jumlah :				